

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dokumen laporan keuangan merupakan sebuah kumpulan informasi yang merekam kinerja suatu perusahaan selama periode tertentu dalam ranah akuntansi. Tujuan utama dari laporan keuangan ini adalah menyajikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas terkait. Informasi yang terdapat dalam laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beragam pemangku kepentingan, membantu mereka dalam merencanakan kebijakan ekonomi jangka panjang. PSAK No.1 menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan suatu ringkasan periodik yang disusun dengan mengikuti prinsip-prinsip akuntansi (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2019:4). Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai situasi finansial entitas individu, asosiasi, atau kelompok bisnis yang bersangkutan.

Laporan keuangan perlu menyediakan informasi yang bersifat dapat dipercaya dan memiliki kualitas tinggi (Btr & Hendratno, 2022). Artinya, laporan keuangan harus terhindar dari segala bentuk manipulasi dan kelalaian yang bersifat material, karena dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan memiliki peranan yang sangat vital bagi perusahaan, sebagai sarana untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, PSAK (2019) menegaskan laporan keuangan harus mampu menyajikan informasi dengan

cara yang mudah dimengerti, relevan, dan dapat diperbandingkan agar memberikan manfaat yang maksimal bagi para pengguna informasi. Dengan demikian, laporan keuangan perlu dijunjung tinggi integritasnya.

Menurut Putri (2022), Integritas laporan keuangan dapat diartikan sejauh mana suatu perusahaan menunjukkan kebenaran dan kejujuran dalam menyajikan semua informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan melalui laporan keuangannya. Integritas laporan keuangan sangat terkait dengan salah satu karakteristik yang diindikasikan oleh Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS), yaitu penyajian yang jujur. Ketika suatu informasi keuangan disampaikan dengan kejujuran, mencerminkan kondisi dan situasi sesungguhnya perusahaan, maka informasi tersebut dapat menjadi landasan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Meskipun demikian, tidak semua perusahaan selalu mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Banyak peristiwa di mana perusahaan melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan, maka perlunya menekankan pemantauan terus-menerus terhadap integritas laporan keuangan dalam lingkup perusahaan (Ayem et al., 2023). Berdasarkan kajian dan beberapa definisi, dapat dijelaskan bahwa integritas laporan keuangan merupakan suatu hal penting dalam merekam kinerja suatu perusahaan, memastikan kejujuran dalam penyajian informasi yang dapat dipercaya, dan menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan para pemangku kepentingan.

Integritas pelaporan keuangan memainkan peran krusial dalam penyesuaian perusahaan di tengah dinamika lingkungan bisnis yang

mengalami perubahan cepat, terutama dengan maraknya penetrasi teknologi yang mendalam (Maharani & Khristiana, 2022). Manipulasi data keuangan yang terjadi menegaskan urgensi untuk menekankan kejujuran dalam pelaporan keuangan. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kelangsungan bisnis perusahaan, tetapi juga merusak kepercayaan investor dan masyarakat terhadap integritas perusahaan. Menghadapi tantangan ini, fokus pada kejujuran, kepatuhan terhadap standar laporan keuangan, dan memastikan transparansi tanpa manipulasi data menjadi suatu keharusan. Selain itu, unsur *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan sistem pengendalian internal menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Kedua elemen ini memainkan peran strategis dalam memperkuat komitmen perusahaan terhadap integritas, terutama dalam lingkungan bisnis yang dinamis.

Komitmen kejujuran dan transparansi bukan sekadar tugas sistem pengendalian internal saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab dalam kerangka *CSR*. Ketepatan serta transparansi dalam penyajian laporan mencerminkan gambaran yang akurat mengenai kinerja sesungguhnya perusahaan, menjadi refleksi dari sistem yang kuat. Semua informasi yang terdapat dalam laporan keuangan yang transparan memiliki nilai penting bagi pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan yang bijak. Penyajian laporan keuangan yang tidak jujur, sebagai bentuk kecurangan dalam pelaporan finansial, dapat menghancurkan integritas dan keandalan informasi tersebut. Kecurangan bisa muncul dari tindakan terencana ataupun kelalaian, yang pada akhirnya menciptakan gambaran yang tidak akurat. Laporan yang menyesatkan

berpotensi menimbulkan kerugian bagi investor atau pihak pemberi kredit. Tindakan kecurangan atau kegagalan yang disengaja dalam penyajian laporan memiliki dampak yang signifikan terhadap kepercayaan serta kepentingan para pemangku kepentingan (Btr & Hendratno, 2022).

Kecurangan laporan keuangan berdasarkan ACFE Indonesia (2019), mengungkap potensi dampak dari aktivitas *fraud* di berbagai sektor di Indonesia. Dalam survei tersebut yang melibatkan 239 responden, tercatat bahwa 48.5% dari mereka menunjukkan bahwa sektor pemerintah mengalami kerugian paling signifikan karena fraud. Berita yang beredar mengenai kecurangan pada perusahaan- perusahaan di Indonesia menjadi salah satu faktor pendorong persepsi masyarakat terhadap tingginya angka kecurangan di sektor pemerintahan. Namun, tak hanya sektor pemerintah yang mendapat sorotan, sektor BUMN juga menjadi perhatian dengan 31.8% responden menyebutnya rentan terhadap kecurangan. Adapun perusahaan swasta mencatat 15.1%, organisasi non-profit mencatat 2.9%, dan sektor lainnya mencatatkan 1.7%. Tabel 1.1 menunjukkan tingkat lembaga yang dirugikan karena fraud hasil dari survei fraud di Indonesia tahun 2019.

**Tabel 1. 1. Tingkat Lembaga yang Dirugikan karena Fraud**

<b>Survei Fraud Indonesia 2019</b>	
<b>Nama</b>	<b>Nominal (%)</b>
Sektor Pemerintah	48.5
BUMN	31.8
Perusahaan Swasta	15.1
Organisasi Non-Profit	2.9
Sektor Lainnya	1.7
<b>Total</b>	<b>100.0</b>

Sumber: ACFE Indonesia (2019)

Konteks analisis dampak finansial yang diakibatkan oleh kecurangan mengungkapkan adanya kerugian yang dialami oleh sejumlah sektor penting di Indonesia. ACFE Indonesia (2019) menunjukkan kerugian dalam kategori melebihi Rp.10 milyar, terlihat bahwa pemerintah memiliki potensi tertinggi dengan persentase sebesar 20.8%. Diikuti oleh organisasi nirlaba yang mencatatkan kerugian sebesar 17.4%. Sebaliknya, perusahaan swasta mengalami defisit sebesar 13.3%, sementara lembaga nirlaba lainnya juga menunjukkan kerugian sekitar 13%, begitu pula dengan BUMN yang mencatatkan angka 11.1%. Kerugian dalam rentang nilai antara Rp.500 juta hingga Rp.1 milyar menunjukkan bahwa perusahaan swasta memperlihatkan angka terbesar, yakni sebesar 24.5%, diikuti oleh pemerintah dengan persentase 23.4%. Organisasi nirlaba serta entitas nirlaba lainnya menunjukkan tingkat kerugian yang setara, mencapai 17.4%. BUMN pun juga menghadapi defisit sekitar 15.9%. Dari temuan ini, tergambar urgensi bagi perusahaan swasta untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya pada rentang nilai kerugian finansial yang signifikan, yaitu antara Rp500 juta sampai Rp1 milyar. Berikut tabel 1.2 tentang kerugian akibat fraud sebesar Rp500 juta sampai Rp1 milyar dan diatas Rp10 milyar berdasar jenis organisasi.

**Tabel 1. 2. Kerugian Akibat Fraud Berdasar Jenis Organisasi**

<b>Nama</b>	<b>Melebihi Rp 10 milyar (%)</b>	<b>Rp 500 juta sampai Rp 1 milyar (%)</b>
Pemerintah	20.8	23.4
Organisasi Nirlaba	17.4	17.4
Perusahaan Swasta	13.3	24.5

Organisasi Lainnya	13.0	17.4
Perusahaan BUMN	11.1	15.9

---

Sumber: ACFE Indonesia (2019)

Industri Keuangan dan Perbankan, yang menghadirkan proporsi signifikan sebesar 41,4%, menyoroti keperluan mendesak akan penguatan tata kelola perusahaan dan keamanan di ranahnya. Sementara sektor Pemerintahan, dengan persentase 33,9%, menandakan urgensi akan reformasi serta peningkatan transparansi. Industri Pertambangan dengan 5,0%, dan Industri Kesehatan serta Manufaktur, masing-masing menyumbang 4,2%, memberikan sinyal penting bagi pihak-pihak terkait untuk terus mengupayakan peningkatan integritas dan pengendalian internal. Industri Lainnya memberikan kontribusi sebesar 3,7%, diikuti oleh Industri Transportasi yang berada pada 2,1%, dan Industri Perumahan serta Pendidikan, keduanya memiliki andil 1,7%, menuntut perhatian spesifik dalam menerapkan mekanisme anti-fraud. Walaupun Industri Perhotelan dan Pariwisata hanya berkontribusi sebesar 1,3%, dan Industri Perikanan serta Kelautan menduduki posisi paling rendah dengan 0,8%, kedua sektor ini tetap memerlukan strategi khusus untuk mencegah potensi kecurangan di masa yang akan datang. Secara keseluruhan, data-data ini menegaskan esensialnya penerapan prinsip tata kelola yang solid di seluruh industri guna mengurangi risiko kecurangan (ACFE Indonesia, 2019).

**Tabel 1. 3. Tingkat Industri/Sektor yang Dirugikan karena Fraud**

<b>Nama</b>	<b>Nominal (%)</b>
Sektor Keuangan dan Perbankan	41.4
Sektor Pemerintah	33.9
Sektor Pertambangan	5.0
Sektor Kesehatan	4.2
Sektor Manufaktur	4.2
Sektor Lainnya	3.7
Sektor Transportasi	2.1
Sektor Perumahan	1.7
Sektor Pendidikan	1.7
Sektor Perhotelan dan Pariwisata	1.3
Sektor Perikanan dan Kelautan	0.8
<b>Total</b>	<b>100.0</b>

Sumber: ACFE Indonesia (2019)

Sektor fiskal dan industri keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi di Indonesia. Namun, keandalan serta kepercayaan masyarakat terhadap keduanya saat ini mulai tergoyahkan. Sebagai indikasi, April 2023 mengungkap kejadian besar terkait kecurangan yang terjadi antara tahun 2021 hingga 2022. Peristiwa penting yang tercatat adalah isu yang melibatkan lembaga perpajakan pada Maret 2023, memunculkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Data dari Satgas Investment Bodong-OJK menyoroti kerugian sebesar Rp 123,51 triliun akibat praktik kecurangan di sektor layanan keuangan dari tahun 2018 hingga 2022. Pada 10 April 2023, Kompas.com melaporkan 2022 itu sendiri, terjadi kenaikan kasus investasi ilegal, platform pinjaman daring yang beroperasi tanpa izin, serta skema gadai tanpa lisensi sah. Laporan dari *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* yang berjudul "*Asia-Pacific Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations*" menempatkan Indonesia sebagai negara keempat dengan jumlah kasus kecurangan tertinggi selama periode tersebut.

Kasus-kasus seperti yang terjadi di PT Asabri, PT Jiwasraya, dan PT Indosurya Inti Finance mencerminkan seberapa besar dampak dari tindakan kecurangan yang tidak hanya mengurangi kepercayaan publik, tetapi juga melemahkan fondasi ekonomi nasional (Kompas.com, 2023)

Sejalan dengan sektor keuangan, industri pertambangan mineral dan batu bara (minerba) di Indonesia mendapat sorotan karena masalah yang terungkap dan menempatkannya sebagai urutan ke-3 (ACFE Indonesia, 2019). Fokus pada sektor pertambangan ini didasarkan pada kompleksitas industri tersebut dan dampak yang luasnya terhadap aspek ekonomi dan lingkungan. Sektor pertambangan mineral dan batu bara merupakan salah satu sektor dengan risiko tinggi terkait keberlanjutan lingkungan dan sosial, serta menimbulkan permasalahan etis dan hukum yang serius. Sektor pertambangan bukan hanya memiliki peran vital dalam perekonomian, tetapi juga menjadi elemen penting dalam proyek-proyek pembangunan di Indonesia.

Salah satu kecurangan pada sektor pertambangan ialah kasus PT Sultan Rafli Mandiri pada tahun 2021 diduga terlibat dalam praktik manipulasi hasil produksi tambang. Tindakan manipulasi ini berpotensi menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp. 74,438 miliar per tahun karena kegagalan dalam membayar pajak dan kewajiban lainnya. Hal ini disebabkan oleh penjualan sebagian hasil produksi PT SRM di pasar gelap, sementara hanya sebagian kecil yang dijual ke ANTAM, sehingga beberapa produk tidak dikenai pajak dan royalti. Meskipun demikian, kepolisian Kalimantan Barat masih dalam tahap penelusuran untuk menentukan tindakan selanjutnya, informasi ini dilaporkan

oleh (Independensi.com, 2021). Adapun kasus tentang kebutuhan untuk mendirikan pabrik peleburan oleh pemerintah, muncul dugaan adanya indikasi perusahaan terlibat dalam tindakan penipuan. Proyek pembangunan fasilitas peleburan di pabrik baru, seperti yang dijelaskan, PT Smelting telah berhasil meningkatkan kapasitas pengolahan dari 1 juta ton konsentrat tembaga per tahun menjadi 1,3 juta ton. Informasi ini didukung oleh laporan dari (cnbcindonesia.com, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa sebelumnya terdapat ketidakakuratan dalam perhitungan produksi, meskipun tidak dapat secara langsung diidentifikasi sebagai tindakan penipuan, melainkan lebih sebagai ketidakakuratan dalam perhitungan produksi sebelumnya.

Tanggapan terhadap rangkaian kasus kecurangan yang memengaruhi sektor pertambangan di Indonesia menyoroti kebutuhan mendesak akan penerapan tata kelola perusahaan atau *corporate governance* yang solid. Pada kasus sektor pertambangan masih belum bisa dikatakan berintegritas laporan keuangannya dengan adanya kecurangan yang masih beredar. Serangkaian peristiwa tersebut memberikan dampak negatif yang cukup signifikan terhadap perekonomian nasional, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan mengancam stabilitas sektor-sektor vital. Implementasi praktik *corporate governance* yang kuat memiliki potensi untuk mengurangi risiko terjadinya tindakan kecurangan (Zhou et al., 2021). Dalam konteks perusahaan yang dimiliki oleh negara di Indonesia, praktik tata kelola perusahaan yang baik mampu menjadi solusi dalam mengatasi masalah integritas laporan keuangan (Fadilah & Nurasik, 2022).

*CSR* juga menjadi faktor penting yang mendukung kesuksesan implementasi tata kelola perusahaan yang baik. *CSR* memastikan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan finansial semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan operasionalnya.

Integritas laporan keuangan itu sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya *CSR* dan komite audit dengan keahlian. Tanggung jawab sosial perusahaan, seperti tercermin dalam praktik *CSR*, menjadi landasan untuk menjalankan bisnis secara bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Upaya perusahaan dalam memenuhi harapan masyarakat dan mempraktikkan keberlanjutan dapat menciptakan lingkungan di mana integritas laporan keuangan menjadi prioritas utama (Nugraheni, 2021). Sementara itu, Keberadaan komite audit yang kompeten dalam bidang akuntansi dan keuangan tidak hanya memastikan kepatuhan perusahaan terhadap standar etika yang tinggi, tetapi juga menjadi motivator internal untuk menjamin kejujuran dan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan (Waruwu & Sugeng, 2023). Dalam menghadapi tekanan eksternal, baik dari regulasi, pasar, atau tuntutan masyarakat, komite audit dengan keahlian menjadi fondasi yang memastikan perusahaan mempertahankan standar integritas tinggi dalam menyampaikan informasi keuangan kepada publik (Prasetyo & Harto, 2023). Oleh karena itu, *CSR* dan komite audit berperan penting dalam menjaga integritas laporan keuangan, menciptakan dasar yang kuat bagi keberlanjutan dan keandalan informasi finansial perusahaan.

*CSR* membentuk landasan integral dalam tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab (Harun, 2020). Prinsip-prinsip *CSR* mencerminkan komitmen suatu perusahaan terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan operasionalnya. Melalui penerapan *CSR*, perusahaan tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan finansial semata, tetapi juga memperhatikan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, *CSR* tidak hanya menjadi wujud kepedulian perusahaan terhadap *stakeholders*, melainkan juga menjadi kunci dalam membangun reputasi positif dan memperkuat ikatan kepercayaan dengan pemangku kepentingan (Cho et al., 2020). Oleh karena itu, penerapan *CSR* bukan hanya tanggung jawab etika, tetapi juga strategi bisnis yang mendasar untuk menjaga integritas perusahaan dan membangun hubungan saling percaya dengan lingkungan sekitarnya. Dalam konteks menjaga integritas, *CSR* berperan sebagai faktor eksternal. Meski demikian, terdapat pula faktor internal yang memiliki kontribusi dalam meningkatkan integritas dan kepercayaan investor. Salah satu unsur internal yang memiliki dampak positif dalam kerangka ini adalah keberadaan komite audit.

Komite audit menjadi elemen krusial dalam memastikan integritas laporan keuangan suatu perusahaan. Komite audit tidak hanya bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap standar etika yang tinggi, tetapi juga berperan sebagai pendorong internal. Keberadaan komite audit menjadi penjamin kejujuran dan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan (Hertina et al., 2023). Dalam menghadapi tekanan dari berbagai

aspek, baik dari regulasi, pasar, atau tuntutan masyarakat, komite audit menjadi fondasi yang memastikan perusahaan mempertahankan standar integritas tinggi dalam menyampaikan informasi keuangan kepada publik. Keberadaan komite audit yang memiliki pemahaman mendalam tentang aspek akuntansi dan keuangan memberikan kontribusi signifikan terhadap menjaganya integritas laporan keuangan perusahaan (Waruwu & Sugeng, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis empiris mengenai dampak *CSR* dan komite audit dengan keahlian terhadap integritas laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2022. Penentuan periode penelitian pada rentang waktu tersebut didasarkan pada dua alasan. Pertama, periode tersebut mencakup rentang waktu yang relatif baru, memungkinkan penelitian untuk memperoleh data terkini yang relevan dengan kondisi terbaru di sektor pertambangan. Kedua, periode ini mencakup masa di mana integritas laporan keuangan menjadi semakin penting di Indonesia, dengan peningkatan kesadaran dan perubahan regulasi yang mempengaruhi praktik pelaporan perusahaan. Konteks regulasi, terutama setelah pengesahan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menjadi semakin relevan untuk diperhatikan dalam kerangka waktu tersebut.

*CSR* dan komite audit dengan keahlian memegang peran sentral dalam strategi bisnis perusahaan, khususnya dalam menjaga integritas laporan keuangan. Penerapan *CSR* tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap dampak sosial dan lingkungan, tetapi juga menjadi landasan untuk menjaga

integritas dan membangun kepercayaan melalui transparansi (Karina & Setiadi, 2020). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit, khususnya Pasal 7, menekankan pentingnya anggota Komite Audit yang memiliki integritas tinggi, kemampuan, serta pengalaman sesuai dengan bidangnya. Mereka diharapkan memahami laporan keuangan perusahaan, bisnis, dan memiliki keahlian khusus di bidang akuntansi dan keuangan (Prasetyo & Harto, 2023). Peran komite audit yang didominasi oleh individu dengan keahlian akuntansi memberikan kontribusi signifikan dalam memastikan kejujuran dan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Keberadaan komite audit dengan latar belakang akuntansi menjadi kunci untuk menangkal potensi risiko manipulasi atau pelanggaran etika dalam pelaporan keuangan (Marzuki et al., 2020). Perusahaan yang dapat mengintegrasikan secara efektif *CSR* dan komite audit dengan keahlian akan lebih mampu menghadapi tekanan eksternal dan memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan jangka panjang serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menguraikan praktik *CSR* dan komite audit dengan keahlian di perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Seiring dengan itu, analisis regresi linear berganda diadopsi untuk menyelidiki korelasi antara indikator *CSR* dan komite audit dengan keahlian terhadap tingkat integritas dalam laporan keuangan. Berdasarkan kajian literatur, terdapat beberapa variabel terkait teridentifikasi seperti pengungkapan *CSR* dan pengaruh keahlian komite

audit perusahaan (Anwar, 2021; Hamdani & Helmy, 2023; Harun, 2020; Hertina et al., 2023; Karina & Setiadi, 2020; Leonardo, 2023; Marzuki et al., 2020; Nugraheni, 2021; Prasetyo & Harto, 2023; Ruchiatna et al., 2020; Ulfa & Challen, 2020; Waruwu & Sugeng, 2023). Literatur mendukung bahwa variabel-variabel ini berkaitan secara signifikan dengan integritas laporan keuangan. Dengan mempertimbangkan dinamika industri pertambangan, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak *CSR* dan komite audit dengan keahlian terhadap integritas laporan keuangan di perusahaan pertambangan.

Penelitian mengenai integritas laporan keuangan memberikan gambaran yang beragam tergantung pada faktor-faktor yang diteliti. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa komite audit dengan keahlian berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan (Hertina et al., 2023; Marzuki et al., 2020; Prasetyo & Harto, 2023; Ruchiatna et al., 2020). Di sisi lain, hasil penelitian yang berbeda yang menunjukkan bahwa komite audit dengan keahlian tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan (Ulfa & Challen, 2020; Waruwu & Sugeng, 2023). Ketika melihat faktor *CSR*, temuan-temuan dari penelitian sebelumnya memberikan pandangan bahwa *CSR* memiliki dampak positif terhadap integritas laporan keuangan (Harun, 2020; Karina & Setiadi, 2020; Leonardo, 2023; Nugraheni, 2021). Di sisi lain, hasil penelitian yang berbeda menunjukkan bahwa *CSR* tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan (Anwar, 2021; Hamdani & Helmy, 2023). Dalam menghadapi dinamika ini, perusahaan perlu memahami bahwa *CSR* dan komite

audit dengan keahlian bukan hanya kewajiban etika, melainkan juga strategi integral untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan nilai perusahaan. Walaupun temuan-temuan awal memberikan wawasan, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi interaksi yang lebih mendalam dan faktor-faktor tambahan yang dapat mempengaruhi keseimbangan antara *CSR* dan komite audit dengan keahlian dalam menjaga integritas laporan keuangan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan penulis pada latar belakang maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah faktor pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan di perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dalam rentang waktu 2019-2022?
2. Apakah faktor komite audit dengan keahlian berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan di perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dalam rentang waktu 2019-2022?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini ialah:

1. Menganalisis dan menguji pengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* integritas laporan keuangan di perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dalam rentang waktu 2019-2022.

2. Menganalisis dan menguji pengaruh komite audit dengan keahlian terhadap integritas laporan keuangan di perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dalam rentang waktu 2019-2022.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini memperluas cakupan literatur dengan memberikan kontribusi baru melalui analisis pengungkapan *CSR* dan keahlian komite audit terhadap integritas laporan keuangan di perusahaan sektor pertambangan di Indonesia. Meskipun literatur telah banyak mengulas tentang *CSR* dan komite audit, penelitian yang secara khusus mengeksplorasi sektor pertambangan di Indonesia masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kesenjangan tersebut dan memberikan wawasan mengenai dinamika unik yang mungkin terjadi dalam konteks *CSR* dan komite audit dengan keahlian di sektor pertambangan Indonesia.

##### **b. Manfaat Praktis**

Temuan yang dihasilkan dari penelitian ini memiliki dampak penting bagi perusahaan pertambangan di Indonesia dalam merancang dan menerapkan *CSR* serta merespons dengan efektif melalui keterlibatan komite audit dengan keahlian untuk mengurangi risiko terkait integritas laporan keuangan. Selain itu, temuan ini memberikan wawasan berharga bagi pihak regulator, seperti Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa

Keuangan (OJK), untuk melakukan tinjauan serta penyempurnaan regulasi yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan di sektor pertambangan.